

SUMSEL SMART PROVINCE: IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN

SUMSEL SMART PROVINCE: IMPLEMENTATION AND READINESS CHALLENGES OF LOCAL GOVERNMENTS IN SOUTH SUMATERA

Marudur Pandapotan Damanik

Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Jakarta
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Pegangsaan Timur 19B Jakarta Pusat, Indonesia
marudur.p.d@kominfo.go.id

Diterima tgl. 26 Okt 2019; Direvisi tgl. 25 Nov 2019; Disetujui tgl. 28 Nov 2019

ABSTRACT

In the context of applying technology to social structures, careful consideration needs to be given to the aspects of readiness. Likewise in the application of the concept of Smart City and Smart Province, the Local Government should first have aspects of smart region preparedness. The study aims to describe the readiness of the provincial government of South Sumatra in launching the Smart Province program through 3 (three) dimensions: technology, human resources (HR), and governance. The research method was carried out through in-depth interviews with ICT officials and managers in the South Sumatra Provincial Government, and four Regency / City Governments: Prabumulih, Banyuasin, Muara Enim, and Ogan Komering Ilir. The results indicate that the Government of South Sumatra Province has had readiness on the technological and governance dimensions, which is indicated by the availability of various ICT applications and infrastructure that have been utilized in the organization's operations. Weaknesses appear in the dimensions of HR, where in terms of quantity and quality, HR personnel in the field of ICT are still inadequate

Keywords: Smart Province, Smart City, Technology Readiness

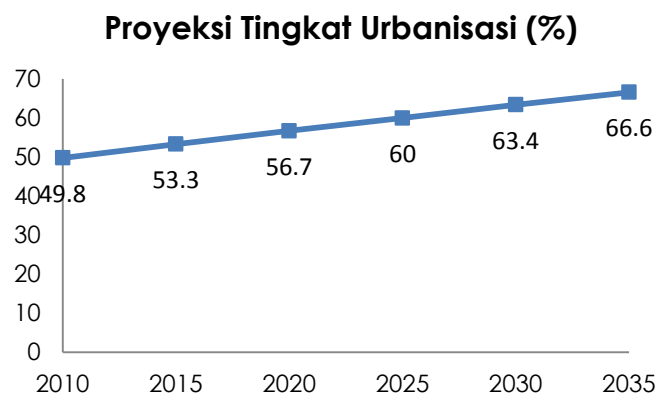
ABSTRAK

Dalam rangka penerapan teknologi pada struktur sosial, perlu pertimbangan yang matang tentang aspek kesiapan. Demikian pula dalam penerapan konsep Smart City dan Smart Province, Pemerintah Daerah hendaknya terlebih dahulu memiliki aspek-aspek kesiapan daerah pintar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesiapan provinsi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencanangkan program *Smart Province* melalui tiga dimensi: teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola. Metode penelitian dilaksanakan melalui wawancara mendalam kepada pejabat dan pengelola TIK di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan empat Pemerintah Kabupaten/Kota: Prabumulih, Banyuasin, Muara Enim, dan Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kesiapan pada dimensi teknologi dan tata kelola, yang ditunjukkan dengan tersedianya berbagai aplikasi dan infrastruktur TIK yang telah dimanfaatkan dalam operasional organisasi. Kelemahan tampak pada dimensi SDM, dimana secara kuantitas dan kualitas, SDM aparatur bidang TIK di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih belum mencukupi.

Kata kunci: Provinsi Cerdas, Kota Cerdas, Kesiapan Teknologi

1. PENDAHULUAN

Secara global, saat ini lebih dari setengah penduduk dunia telah hidup di wilayah perkotaan. Laporan World Urbanization Prospect pada tahun 2014 mengungkapkan tercatat 53% penduduk di dunia telah tinggal di wilayah urban. Laju urbanisasi ini diprediksi akan terus meningkat, hingga pada 2050 diperkirakan lebih dari dua per tiga penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. (UN, 2014). Fenomena ini juga terjadi di hampir seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Pada tahun 2010 persentase jumlah penduduk kota sebesar 49,8%, dan angka ini diprediksi akan meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035 (BPS, 2013).



Sumber: (BPS, 2013)

Gambar 1. Proyeksi tingkat urbanisasi di Indonesia 2010 - 2035

Urbanisasi adalah proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan (*urban area*). Pertambahan penduduk di wilayah perkotaan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 1) kelahiran alamiah, 2) perpindahan penduduk, 3) aneksasi (penggabungan wilayah), dan 4) reklasifikasi. Oleh karena itu perpindahan penduduk hanyalah sebagian faktor yang mempengaruhi urbanisasi (Tjiptoherijanto, 1999). Proses pindahnya penduduk desa ke kota sebenarnya adalah fenomena yang wajar. Proses ini umumnya dipicu karena adanya perbedaan pertumbuhan wilayah atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas pembangunan antara perdesaan dan perkotaan (Harahap, 2013). Kegiatan perekonomian yang lebih marak di wilayah kota menjadi daya tarik, yang sering menjadi motivasi penduduk desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak.

Namun laju urbanisasi yang tinggi membawa risiko munculnya berbagai persoalan dalam pengelolaan perkotaan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi di wilayah perkotaan dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi antara lain (BAPPENAS, 2015):

1. Kesenjangan antar wilayah, antar kota, maupun antara kota dan desa
2. Pemenuhan standar pelayanan perkotaan
3. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah kota besar lainnya
4. Kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, modal sosial, dan belum termanfaatkannya sosial-budaya.
5. Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembiayaan pembangunan perkotaan
6. Peraturan yang berorientasi pada sektoral
7. Kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota, partisipasi masyarakat, profesional, dan swasta
8. Efisiensi dan pengendalian
9. Penyediaan lahan, serta tidak terkontrolnya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan
10. Rendahnya daya saing, produktivitas, dan belum berkembangnya ekonomi lokal di perkotaan

Untuk menjaga stabilitas wilayah, pemerintah daerah memiliki andil dan tanggung jawab besar dalam hal ini. Solusi dan langkah konvensional tidak cukup mengantisipasi dan menanggulangi persoalan kota yang semakin lama semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu merumuskan strategi dan formula yang komprehensif untuk dapat menyelesaikan masalah perkotaan dengan lebih cepat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan perkotaan adalah melalui pendekatan Kota Cerdas atau Smart City. Secara umum pendekatan *Smart City* adalah konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bertujuan untuk

memberikan kualitas hidup yang tinggi bagi warga masyarakat. Pemanfaatan TIK dalam pengelolaan kota dalam konteks ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti transportasi, energi, ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan kualitas pelayanan umum.

Dalam struktur hirarki pemerintahan daerah di Indonesia, konsep *Smart City* juga dapat diterapkan pada tingkat provinsi yang dinamakan *Smart Province*. Beberapa daerah yang mulai bergerak menerapkan *Smart Province* antara lain Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Masing-masing daerah dapat menggunakan pendekatan yang berbeda. *Smart Province* dapat dipandang sebagai upaya menuju Indonesia cerdas yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bergerak dalam level provinsi maka kata kunci dalam pelaksanaan *Smart Province* adalah integrasi, yaitu penyatuan basis-basis data serta layanan elektronik lintas kabupaten/kota untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas. Untuk itu koordinasi antar pemerintah daerah mutlak dibutuhkan. Keberhasilan *Smart Province* dapat dicapai jika seluruh komponen pemerintahan daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa dapat berkolaborasi dan bergerak bersama (Supangkat, 2018).

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, mulai dari pertanian, perkebunan, dan sumber daya mineral. Dari sisi infrastruktur, ibukota Sumatera Selatan bahkan dipercaya menjadi tempat diselenggarakannya Asian Games tahun 2018 yang membuktikan daerah ini mampu untuk berkembang lebih jauh lagi. Pendekatan *Smart City* untuk Provinsi (*Smart Province*) dinilai sangat tepat digunakan sebagai model pengembangan wilayah Sumatera Selatan. Sebagaimana definisi *Smart City* yaitu sebuah kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola sumber daya, peningkatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup serta memberikan layanan publik yang paripurna bagi warga, pendekatan *Smart Province* diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih memaksimalkan potensi daerah untuk memberikan kualitas hidup yang lebih tinggi bagi warga masyarakat.

Dalam upaya mengimplementasikan TIK perlu adanya kesiapan yang matang dari berbagai aspek. Implementasi TIK dalam organisasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi semata, namun faktor sosial dan budaya juga perlu diperhatikan. Demikian pula halnya dalam menjalankan program *Smart Province*, Pemerintah Sumatera Selatan perlu persiapan dalam berbagai aspek agar berjalan seperti yang diharapkan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek utama dalam penyiapan sebuah inisiatif TIK: (1) Sumber daya manusia, yang mencakup kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) Teknologi, yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum; dan (3) Tata Kelola, yang mencakup kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart Province*. Kesiapan program *Smart Province* berada pada pemenuhan faktor-faktor tersebut secara proporsional. Ketiga aspek tersebut harus teralokasi secara efektif untuk menjawab kebutuhan ekosistem TIK dalam penerapan *Smart Province*. Oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut, perlu kajian secara matang untuk menilai kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan inisiatif *Smart Province*. Pengetahuan tentang kondisi kesiapan pemerintah daerah bermanfaat sebagai tolok ukur pelaksanaan serta mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang ada untuk kemudian dilakukan pemenuhan aspek-aspek *e-readiness* seoptimal mungkin.

1.1 Penerapan *Smart City* di Indonesia

Smart City saat ini menjadi isu global yang banyak diperbincangkan baik dalam ranah ilmiah maupun dalam tataran kebijakan pemerintahan. Istilah ini pertama kali digaungkan oleh IBM pada tahun 1998, dan mulai berkembang pada sekitar tahun 2000-an (Annisah, 2017). Berbagai penelitian terkait penerapan *Smart City* di Indonesia sudah cukup banyak ditemukan pada sumber-sumber kepustakaan. Arah tema riset tentang *Smart City* cukup beragam mulai dari konsep *Smart City* yang digunakan, penerapan aplikasi dan teknologi, hingga pada aspek kesiapan, tata kelola dan lain sebagainya.

Saat ini proses implementasi *Smart City* di Indonesia terus digalakkan secara konsisten di berbagai kota di Indonesia. Berkat dukungan dari jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai implementator, arah implementasi konsep *Smart City* semakin jelas dan terarah. Pada tahun 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika menggagas program Gerakan 100 *Smart City* di Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kantor Staf Presiden. Gerakan ini bertujuan memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam mengimplementasikan konsep *Smart City* agar mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengoptimalkan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Hasilnya, hingga pada tahun 2018 telah terpilih 75 kota/kabupaten yang didampingi dan dibimbing oleh para ahli dalam mengimplementasikan konsep smart city. Tren ini juga disambut baik oleh berbagai Pemerintah Daerah di Indonesia dengan meluncurkan berbagai inovasi aplikasi maupun pembenahan dalam struktur kelembagaan organisasi.

1.2 *Smart Province*: Konsep *Smart City* pada level Provinsi

Definisi konsep kota cerdas atau *Smart City* hingga saat ini masih berkembang dalam ranah penelitian maupun implementasinya, oleh karena itu ditemukan beragam arti *Smart City* yang dikemukakan dalam berbagai literatur. Secara umum *Smart City* diartikan sebagai kota yang memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur TIK yang dapat menciptakan perkembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, manajemen SDA melalui tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang partisipatif (Caragliu, Bo, & Nijkamp, 2009). Dalam sumber lain mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan kota sehingga pemerintah dapat mengetahui (*sensing*), memahami (*understanding*) dan mengendalikan (*controlling*) berbagai sumber daya yang ada di dalam wilayah tersebut dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Inayatul Ulya A, Tarigan, & Hasnur, 2017).

Berbagai studi telah banyak mendefinisikan smart city. Konsep ini merupakan studi multidisiplin, yang pada awalnya para peneliti mendefinisikan *Smart City* yang fokus pada “smart”, sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi kota. Belakangan definisi *Smart City* semakin meluas dengan mengaitkan dampak dari penerapan *smart city*, yaitu keberlanjutan (*sustainability*), kualitas hidup warga, dan pelayanan publik. (Ramaprasad, Sánchez-Ortiz, & Syn, 2017). Caragliu dkk (2009) merangkum beberapa karakteristik *Smart City* ke dalam beberapa poin yaitu:

1. Pemanfaatan infrastruktur teknologi dan jaringan komputer
2. Pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi
3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
4. Meningkatkan peran industri teknologi dan industri kreatif dalam pembangunan

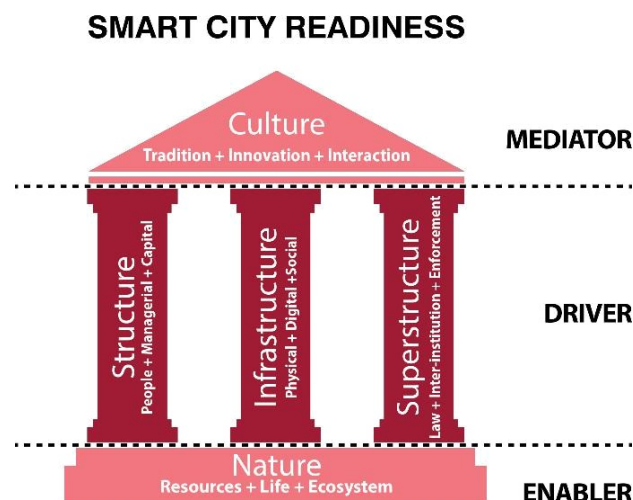
5. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia
6. Sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Penerapan konsep *Smart City* sesungguhnya dapat diimplementasikan pada berbagai level pemerintahan mulai dari pemerintahan nasional (*smart nation*), provinsi (*Smart Province*), kota (*smart city*), hingga ke tingkat pemerintahan desa (*smart village*). Studi yang berkaitan dengan *smart nation* pernah dilakukan oleh Ho (2017) tentang visi negara Singapura untuk menjadi *smart nation*. Dalam studinya penulis mendefinisikan *smart nation* sebagai sebuah negara yang dapat memberikan kualitas kehidupan yang baik serta menawarkan berbagai kesempatan bagi warga negaranya dengan pemanfaatan berbagai teknologi (Ho, 2017). Untuk *Smart Province*, maka unsur *smart* harus dapat melekat pada tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintahan provinsi, yaitu antara lain menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, dan mengkoordinasikan berbagai urusan di tingkat kabupaten/kota.

1.3 *E-readiness*: Kesiapan Organisasi dalam Penerapan Teknologi

Smart City merupakan konsep yang kompleks dan multidisiplin ilmu. Konsep *Smart City* tidak hanya mencakup aspek inovasi dan teknologi namun juga melibatkan berbagai aspek sosial, seperti penerimaan dan pemanfaatan pengguna, organisasi maupun kesiapan dalam adopsi teknologi. Kesiapan dalam adopsi teknologi atau *E-readiness* diartikan sebagai kemampuan pengguna dalam menggunakan teknologi dan mengambil manfaat dari teknologi tersebut. Sebuah organisasi yang akan memanfaatkan teknologi dalam proses bisnisnya penting untuk mempersiapkan berbagai aspek. Menurut (M. Baeuo, Ab. Rahim, & Alaraibi, 2016) yang melakukan studi pada pelaksanaan *e-government*, faktor utama kegagalan *e-government* adalah mengadopsi teknologi informasi dalam pemerintahan tanpa memperhitungkan kesiapan organisasi sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang penerapan *e-government*, dimana kondisi ini mengakibatkan munculnya berbagai hambatan dalam implementasi *e-government*.

Dalam membangun kota yang berbasis *Smart Province* atau *smart city*, hendaknya daerah tersebut terlebih dahulu memiliki kesiapan daerah pintar. Terdapat beberapa elemen utama yang menjadi faktor kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*), struktur daerah (*structure*), infrastruktur (*infrastructure*), suprastruktur (*suprastructure*), dan budaya (*culture*) seperti yang disajikan pada Gambar 2 (Kemkominfo, 2017).



Gambar 2. Elemen kesiapan (*e-readiness*) Smart City

Penjelasan dari tiap elemen kesiapan (*e-readiness*) adalah sebagai berikut:

1. Budaya, yang meliputi kebiasaan atau tradisi daerah setempat, inovasi, dan interaksi masyarakat;
2. Struktur. Meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
3. Infrastruktur. Meliputi pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
4. Suprastruktur. Mencakup penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.
5. Alam (*Nature*). Meliputi sumber daya alam, kehidupan, dan ekosistem sebagai gambaran interaksi alam, manusia, dan makhluk hidup lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah studi deskriptif dan dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode yaitu *pertama*, melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. FGD ini bertujuan untuk mendapatkan gagasan tentang bagaimana *Smart Province* yang ideal, serta untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan *e-government*. *Kedua*, Pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bertujuan untuk menggali tentang sejauhmana pelaksanaan *Smart Province* dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai tujuan yang tercantum dalam Pergub Nomor 47 Tahun 2017 serta kesiapan yang telah dilaksanakan. Wawancara dilakukan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan 4 (empat) Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada tiap pemerintahan daerah kemudian dipilih 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki urusan di bidang komunikasi dan informatika dan pelayanan publik. Ke-empat OPD tersebut adalah:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Informan kunci pada tiap OPD yang dipilih adalah yang memahami tentang kebijakan pengembangan *Smart Province* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengelolaan TIK di OPD pelayanan publik, yaitu:

Tabel 1. Informan Wawancara Mendalam

No.	Perangkat Daerah	Informan
1.	Provinsi Sumatera Selatan: Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan Dinas Dukcapil Dinas PMPTSP	Plt. Kepala Dinas Kominfo Sekretaris Dinas Kesehatan Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kabid Promosi Dinas PTSP
2.	Kota Prabumulih: Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan Dinas Dukcapil Dinas PMPTSP	Kasi Infrastruktur TIK Kepala Dinas Kesehatan Pengelola TIK Dinas Dukcapil Kepala Dinas PTSP

3.	Kabupaten Muara Enim: Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan Dinas Dukcapil Dinas PMPTSP	Kabid <i>E-government</i> Dinas Kominfo Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kasi Sistem Informasi Dinas PMPTSP
4.	Kabupaten Banyuasin: Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan Dinas Dukcapil Dinas PMPTSP	Kepala Dinas Kominfo Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kabid Pengelola Informasi Adm. Kependudukan Kabid Pengaduan, Pengembangan SDM, TI, dan Pelaporan
5.	Kabupaten Ogan Komering Ilir: Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan Dinas Dukcapil Dinas PMPTSP	Kepala Dinas Kominfo Kasubbag Program dan Informasi Kasi Identitas Penduduk Dinas Dukcapil Kabid Promosi dan Pengembangan Iklim

Data yang diperoleh melalui wawancara dan FGD kemudian dianalisis dengan metode analisis model Miles dan Huberman (2009) yaitu: 1) mereduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan kesimpulan.

menggunakan metode survei, yakni metode yang meneliti sejumlah sampel dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya (Kriyantono, 2014; Wimmer & Dominick, 2011). Peneliti menyebarkan kuesioner kepada para praktisi humas anggota Perhimpunan Humas (Perhumas).

Kuesioner berisi instrumen peran humas dari DeSanto et al. (2007), yang dideskripsikan di Tabel 1. Kuesioner ini dipilih karena berisi ukuran-ukuran tentang peran-peran manajerial dan peran teknis.

Tabel 2. Peran Humas

Peran Humas	Deskripsi	Pernyataan
Peran penasehat strategi dan pengambilan keputusan	Praktisi Humas memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen senior dalam organisasi mereka dan memiliki peran aktif dalam proses pembuatan kebijakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya memberikan masukan kepada pimpinan secara rutin tentang isu komunikasi dan segala bentuk tantangannya. 2. Saya berkontribusi secara rutin pada pembuatan kebijakan perusahaan/instansi. 3. Saya memberikan masukan kepada pimpinan tentang cara menyampaikan sebuah kebijakan dengan baik. 4. Saya memberikan saran kepada pimpinan tentang strategi pengambilan keputusan yang nantinya akan dilihat oleh media. 5. Saya memberikan masukan kepada pimpinan untuk tiap isu penting yang berkaitan dengan stakeholder. 6. Saya bekerjasama dengan manajemen dalam merumuskan strategi Humas. 7. Saya terlibat langsung dalam keputusan perusahaan ditingkat manajemen

Peran memonitor dan mengevaluasi	Praktisi Humas memiliki tanggungjawab manajerial untuk melakukan <i>organizing, controlling, and monitoring</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 8. Saya bertanggungjawab dalam penerapan strategi komunikasi perusahaan/instansi. 9. Saya bekerjasama dengan pimpinan untuk memastikan pelaksaaan dari keputusan strategi Humas saya telah dipahami. 10. Sebuah elemen penting dalam pekerjaan saya adalah melakukan perencanaan strategi Humas untuk stakeholder internal maupun eksternal.
Peran manajemen isu	Berkaitan dengan peran Humas dalam mendiagnosis dan menanggapi ancaman eksternal dari masalah besar atau kecil.	<ol style="list-style-type: none"> 11. Saya bekerjasama dengan pimpinan dalam menentukan target yang sesuai dengan fungsi Humas. 12. Saya bertanggungjawab untuk menetapkan target fungsi Humas. 13. Saya harus memastikan bahwa fungsi komunikasi Humas terlaksana sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang telah ditetapkan. 14. Saya memiliki tanggungjawab atas pihak eksternal yang mengevaluasi strategi Humas. 15. Saya bertanggungjawab dalam memantau kinerja fungsi Humas sesuai dengan target yang diharapkan. 16. Melakukan negosiasi dengan divisi lain dalam hal sumber daya dan beban kerja adalah salah satu pekerjaan saya. 17. Saya bernegosiasi dengan manajemen senior untuk menetapkan target fungsi Humas. 18. Saya dianggap sebagai pakar ketika organisasi saya sedang menghadapi krisis. 19. Bagian terpenting dalam pekerjaan saya adalah berhubungan dan bernegosiasi dengan pihak eksternal stakeholder. 20. Saya bertanggungjawab dalam menghadapi kejadian tidak terduga di dalam maupun di luar yang dapat mengancam organisasi. 21. Saya bertanggungjawab mengelola program-program untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. 22. Saya membantu organisasi dalam mengelola masalah-masalah yang timbul karena stakeholder eksternal. 23. Saya terus memantau perkembangan yang ada di luar yang mungkin akan memengaruhi organisasi. 24. Saya mengumpulkan dan menganalisis intelejen eksternal yang relevan dengan organisasi.

		25. Saya memberikan saran kepada organisasi dalam menanggapi setiap ancaman atau masalah utama.
Menawarkan solusi	Berkaitan dengan reaksi praktisi Humas dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal seperti ancaman atau krisis yang dihadapi organisasi.	26. Saya sering menjadi “pemadam kebakaran” dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal organisasi 27. Membantu untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh orang lain dalam organisasi adalah salah satu tanggungjawab utama saya. 28. Bertukar informasi dengan orang lain dan mengontrol informasi tertentu, merupakan salah satu pekerjaan saya. 29. Pada saat rapat, saya akan menjelaskan kembali fungsi Humas, kebijakan tersebut mungkin akan memengaruhi fungsi Humas
Peran teknis	Berkaitan dengan kegiatan mengawasi, dan dalam banyak kasus implementasi, tugas teknis komunikasi termasuk relasi dengan media.	30. Pekerjaan saya selalu melibatkan diri dalam pengelolaan staf yang bekerja pada bagian saya, untuk memastikan agar para staf bekerja secara efektif. 31. Saya menyiapkan laporan rutin tentang operasional fungsi komunikasi untuk manajemen senior. 32. Pekerjaan saya yaitu berurusan dengan email dan surat menyurat. 33. Saya sering menangani aspek teknis dalam memproduksi materi komunikasi. 34. Saya mengawasi materi visual/desain untuk organisasi

2.1 Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Instrumen berupa kuesioner disebarikan kepada anggota Perhumas. Pemilihan sampel (responden) ini berdasarkan prinsip kemudahan akses (*convenience sampling*), yaitu sampel yang didapatkan menurut kemudahan data yang dimiliki oleh populasi (Kriyantono, 2014; Wimmer & Dominick, 2011).

Pemilihan teknik sampling berdasarkan kontak awal dengan Perhumas. Peneliti telah menghubungi sekretariat Perhumas Indonesia untuk membantu penyebaran kuisisioner, selain itu juga dilakukan penyebaran link kuisisioner melalui grup Humas di Facebook, melalui direct message di akun Facebook pribadi praktisi, mencari alamat email praktisi melalui LinkedIn, dan mendatangi langsung praktisi di tempat kerja.

Dari hasil pengumpulan sampel yang dijadikan sebagai responden, didapatkan oleh peneliti dalam waktu sekitar 4 bulan dengan memperoleh 69 responden: 35 praktisi laki-laki dan 34 praktisi perempuan.

2.2 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran dari Likert, yakni untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang (Kreuger & Neuman, 2006). Bentuk skalanya adalah mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan

melihat *mean-score* dari kategori peran humas. Untuk penyajian data, peneliti menggunakan tabel distribusi frekuensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dari Potret Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Sumsel *Smart Province*

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Metodologi, penelitian ini diawali dengan menggambarkan kesiapan Kabupaten/Kota dalam penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data di tataran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang menjadi sampel Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Prabumulih.

a. Kesiapan Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang berhasil lolos dalam program Gerakan 100 *Smart City* yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari sisi kesiapan teknologi, Kabupaten Muara Enim telah memiliki infrastruktur jaringan yang telah menjangkau seluruh OPD dan beberapa kecamatan di Kabupaten Muara Enim. Sebagian OPD telah terhubung dengan fiber optik sedangkan sebagian lainnya menggunakan sambungan *radio wireless* dan VSAT. Pada tahun 2019 ini Kab. Muara Enim berencana akan menghubungkan seluruh kecamatan dengan jaringan Diskominfo.

Dalam menunjang kegiatan operasional, Pemerintah Daerah telah menggunakan aplikasi berbasis online di beberapa unit kerja untuk layanan kependudukan, layanan pengendalian pembangunan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa. Untuk meningkatkan partisipasi publik, Pemda memiliki aplikasi pengaduan online sebagai media bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan yang terjadi di lingkungannya. Penggunaan surat elektronik (*email*) sudah menggunakan domain resmi muaraenimkab.go.id. Namun karena keterbatasan sumber daya, penggunaan *email* resmi masih sebatas untuk kedinasan dan belum dapat mengakomodir penggunaan secara personal masing-masing pegawai.

Adapun dalam proses integrasi data, Pemda Kab. Muara Enim mengaku belum dapat merealisasikannya. Kendalanya adalah masing-masing OPD memiliki data dengan struktur yang berbeda. Disamping itu upaya untuk integrasi data membutuhkan perubahan yang signifikan pada aplikasi dan struktur data itu sendiri, sehingga inisiatif untuk mengintegrasikan data dinilai membutuhkan perencanaan yang lebih matang.

Dari sisi SDM, Pemerintah Kab. Muara Enim menilai ketersediaan SDM khususnya bidang TIK masih belum mencukupi. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan OPD menggunakan beberapa tenaga kontrak untuk membantu operasional kedinasan. Upaya untuk mengajukan penambahan pegawai sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Adapun dalam rangka pengembangan kompetensi SDM TIK, Pemda biasanya mengirimkan pegawai yang berkompeten ke acara Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan SDM aparatur khususnya bidang TIK adalah tidak adanya penganggaran khusus untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi bidang TIK.

Dari sisi tata kelola, dukungan dan perhatian kepala daerah sudah dinilai sudah cukup baik dengan alokasi anggaran belanja TIK yang cukup besar. Perhatian Pemda terhadap TIK juga diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang berkenaan dengan pembangunan Smart Regency yang mencakup tentang pengelolaan dan pemanfaatan TIK di lingkup pemerintah daerah (*e-government*), pembangunan TIK dengan pendekatan Smart City, dan aspek keamanan informasi.

Tabel 2. Hasil Penelitian Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Aspek Kesiapan	Hasil Temuan
Teknologi	<p>Aplikasi berbasis Online Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menggunakan aplikasi dan sistem informasi online untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi baik untuk menunjang administrasi, komunikasi, dan pelayanan publik.</p> <p>Jaringan internet Jaringan internet di sebagian besar OPD telah terintegrasi dari jaringan Dinas Kominfo dengan media fiber optik, radio wireless, dan VSAT untuk OPD yang lokasinya jauh.</p> <p>Integrasi Data Integrasi data di Kab. Muara Enim belum terealisasi, salah satunya dikarenakan masing-masing OPD memiliki database, server, dan struktur data yang berbeda. Disamping itu integrasi data membutuhkan aplikasi yang siap untuk terintegrasi di masing-masing OPD, yang berarti harus memodifikasi aplikasi lama atau membuat membuat aplikasi baru.</p>
SDM	<p>Ketersediaan SDM pengelola TIK Untuk Dinas Kominfo, jumlah PNS bidang TIK saat ini masih dirasa kurang, mengingat luas wilayah kerja Kab. Muara Enim yang cukup luas. Oleh sebab itu Diskominfo mengandalkan tenaga Non-PNS untuk membantunya. Untuk di beberapa OPD lain (Mis. DPMPSTP) mengaku masih kekurangan SDM bidang TIK. Terkait masalah ini, OPD sudah berupaya mengusulkan melalui BKD namun belum terealisasi.</p> <p>Peningkatan Kompetensi SDM Tidak ada penganggaran khusus untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi SDM TIK dilaksanakan dengan mengirim staf ke acara bimtek, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan instansi eksternal.</p>
Tata Kelola	<p>Dukungan terhadap Pengembangan TIK Pimpinan memperhatikan pengembangan TIK. Anggaran belanja bidang TIK untuk tahun 2019 telah ditingkatkan hingga Rp. 2,5 Milyar.</p> <p>Ketersediaan Aturan Pelaksanaan Pemb. Muara Enim memiliki Perbup No. 18 Thn 2018 tentang Pelaksanaan <i>E-government</i>, SK Bupati tentang Penetapan Dewan TIK Daerah, Perbup tentang Smart Regency yang memuat Rencana Strategis dan Rencana Induk TIK.</p>

b. Kesiapan Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu Pemda yang telah banyak berinovasi dan yang dinilai paling siap untuk mendukung program Sumsel *Smart Province*. Pemda Kab Banyuasin melalui Dinas Kominfo saat ini sedang menjalankan Program *Smart City* dan menjadi salah satu pemerintah daerah yang masuk dalam gerakan 100 *Smart City* Indonesia.

Smart City yang digagas Banyuasin bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga program pembangunan daerah tidak hanya fokus pada teknologi informasi dan komunikasi, namun utamanya adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Saat ini Banyuasin sedang memulai proyek pengolahan air bersih yang bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Disamping itu juga Pemda sedang menjajaki kerja sama dengan investor Amerika untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Kerjasama dengan provider internet dalam negeri juga dilakukan untuk penyediaan akses jaringan internet ke beberapa desa di Kab. Banyuasin.

Dari sisi teknologi, Pemda Banyuasin telah menggunakan berbagai aplikasi berbasis online. Untuk kebutuhan pelayanan publik, Pemda memiliki aplikasi pengaduan masyarakat, dan sistem perizinan secara online.

Tabel 3. Hasil Penelitian Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Aspek Kesiapan	Hasil Temuan
Teknologi	<p>Aplikasi berbasis Online Aplikasi berbasis online yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin di berbagai OPD: Aplikasi pengaduan masyarakat, Sistem Informasi Perizinan Online, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu, E-Voting, dan aplikasi lainnya yang tersebar di sejumlah OPD.</p> <p>Jaringan internet Jaringan internet di OPD terdistribusi dari Dinas Kominfo.</p> <p>Integrasi Data Integrasi data di Kabupaten Banyuasin sedang dalam tahap memulai kerjasama dengan antara Dinas Kominfo dengan Dinas Dukcapil untuk mewujudkan integrasi data berdasarkan nama dan NIK.</p>
SDM	<p>Ketersediaan SDM pengelola TIK Pemkab Banyuasin membentuk Dewan <i>Smart City</i> yang beranggotakan dari berbagai stakeholder dan OPD lain. Disamping itu pula dibentuk beberapa Pokja (Kelompok Kerja) dari Dewan <i>Smart City</i> yang bertugas menangani proyek-proyek tertentu.</p> <p>Peningkatan Kompetensi SDM Tidak ada penganggaran khusus untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi SDM TIK dilaksanakan dengan mengirim staf ke acara bimtek, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan instansi eksternal.</p>
Tata Kelola	<p>Dukungan terhadap Pengembangan TIK Dukungan Kepala Daerah dalam pengembangan TIK diwujudkan dengan ikut sertanya Kabupaten Banyuasin dalam program Gerakan <i>Smart City</i>. Berbagai proyek pembangunan dilaksanakan dengan menggandeng investor asing, seperti proyek internet desa, pembangkit listrik tenaga sampah, dan sistem pengolahan air bersih.</p> <p>Ketersediaan Aturan Pelaksanaan Sejak dimulainya program <i>Smart City</i> Banyuasin, Pemda secara serius mempersiapkan landasan hukum dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan TIK, antara lain: Perbup tentang <i>Smart City</i>, Masterplan Banyuasin <i>Smart City</i>, Prosedur pengamanan informasi.</p>

c. Kesiapan Kabupaten OKI

Kabupaten OKI merupakan daerah administratif dengan wilayah paling luas di bawah Provinsi Sumatera Selatan yaitu 19.023 m². Kesiapan pada aspek teknologi di Kab. OKI tidak jauh berbeda. OPD pada umumnya telah menggunakan aplikasi berbasis online dan sistem informasi untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi. Namun dari semua OPD yang disurvei, hanya Dinas PTSP yang menggunakan aplikasi online untuk proses pelayanan publik di bidang perizinan. Adapun di Dinas Dukcapil, aplikasi online digunakan sebagai sistem informasi dan komunikasi data dengan pusat data Ditjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk proses pelayanan publik di bidang kependudukan masih berlangsung dengan tatap muka.

Jaringan internet untuk OPD belum terdistribusi dari Diskominfo sehingga penyediaan jaringan internet di OPD dilaksanakan oleh masing-masing OPD dengan menggandeng provider internet sebagai pihak ketiga. Integrasi data dan aplikasi masih terbatas. Saat ini aplikasi yang digunakan secara bersama adalah *e-planning dan e-budgeting*. Integrasi data sektoral saat ini baru diinisiasi dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 4. Hasil Penelitian Pemerintah Kabupaten OKI

Aspek Kesiapan	Hasil Temuan
Teknologi	<p>Aplikasi berbasis Online OPD di Kab. OKI telah menggunakan berbagai aplikasi berbasis online untuk menunjang tugas dan fungsi OPD. Sebagian besar aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, seperti SIAK di Disdukcapil, SICANTIK dan OSS di Dinas PMPTSP, Dapodik di Dinas Pendidikan, SIMPKH di Dinas Sosial, SIMIOB & SIMPADA untuk pengelolaan pajak daerah, dan yang lainnya.</p>

	<p>Jaringan internet Jaringan internet di OPD Kab. OKI dikelola oleh masing-masing OPD dan belum terintegrasi.</p> <p>Integrasi Data Integrasi data di Kabupaten OKI belum terlaksana. Penggunaan aplikasi terintegrasi hingga saat ini masih pada <i>e-planning dan e-budgeting</i>. Pemkab OKI belum memiliki Pusat Data. Diskominfo memiliki server namun masih diperuntukkan untuk aplikasi e-planning, e-budgeting, dan JDIIH.</p>
SDM	<p>Ketersediaan SDM pengelola TIK Pemkab OKI masih kekurangan SDM bidang TIK. Jumlah PNS bidang TIK ada 3 orang untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan TIK dibantu 2 orang Non-PNS untuk mengurus jaringan komputer.</p> <p>Peningkatan Kompetensi SDM Tidak ada penganggaran khusus untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi SDM dilakukan dengan mengirim pegawai untuk bimtek atau pelatihan ketika ada undangan dari instansi eksternal.</p>
Tata Kelola	<p>Dukungan terhadap Pengembangan TIK Pemkab OKI berencana melakukan integrasi data berbasis NIK untuk aplikasi-aplikasi di OPD. Untuk hal ini, Diskominfo akan berperan sebagai integrator sistem, sedang detail integrasi datanya akan diserahkan ke masing-masing OPD yang terkait.</p> <p>Ketersediaan Aturan Pelaksanaan Pemkab OKI memiliki Perda No 20/2018 tentang pelaksanaan SPBE. Disamping itu Pemkab OKI juga memiliki Dokumen Masterplan TIK sebagai dasar perencanaan</p>

d. Kesiapan Kota Prabumulih

Hasil pengumpulan data menunjukkan pada dimensi teknologi, ketersediaan jaringan internet di OPD Pemkot Prabumulih sudah memadai. Hanya saja sebagian besar OPD mengelola jaringan internetnya masing-masing dan belum terkoneksi dan terintegrasi dari Dinas Kominfo. Kebutuhan akan jaringan internet yang memadai disadari oleh pimpinan daerah, sehingga pada tahun 2019 Dinas Kominfo mendapat peningkatan alokasi anggaran untuk belanja TIK sebesar 5,4 milyar. Adapun untuk integrasi data, Pemerintah Daerah Prabumulih baru memulai uji coba dalam penggunaan aplikasi *e-planning dan e-budgeting*, dan baru menginisiasi kerjasama penggunaan data kependudukan di sektor kesehatan.

Dimensi SDM menjadi salah satu kelemahan dalam implementasi TIK di Pemerintah Daerah. Dinas Kominfo yang menjadi leading sector pengembangan TIK di daerah masih kekurangan SDM untuk menangani kebutuhan TIK di Daerah. Menurut informan dari Dinas Kominfo Kota Prabumulih, saat ini hanya terdapat 7 (tujuh) orang SDM untuk menangani pekerjaan di bidang TIK. Adapun pada dimensi tata kelola, Pemerintah kota Prabumulih telah memberikan dukungan terhadap pengembangan TIK oleh Kepala Daerah dengan diterbitkannya Perbup No. 64 tahun 2017 tentang pelaksanaan SPBE, dan sedang menyelesaikan masterplan-nya pada tahun ini.

Tabel 5. Hasil Penelitian Pemerintah Kota Prabumulih

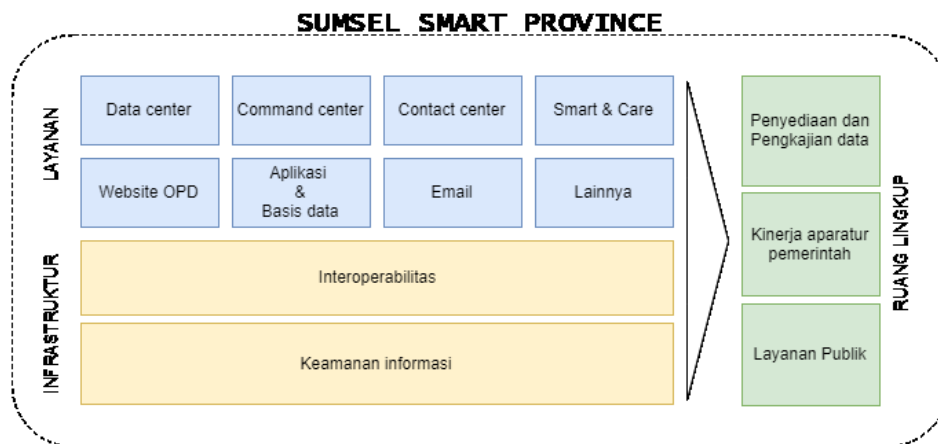
Aspek Kesiapan	Hasil Temuan
Teknologi	<p>Aplikasi berbasis Online Pemkab Prabumulih melalui OPDnya menggunakan aplikasi online sesuai tugas dan fungsinya, sebagai contoh Dinas Dukcapil menggunakan SIAK, Dinas PTSP menggunakan OSS dan SICANTIK untuk perizinan, aplikasi ASPAK di Dinas Kesehatan.</p> <p>Jaringan internet Pemkota Prabumulih belum sepenuhnya terhubung dengan FO. Beberapa OPD menyediakan jaringan internet sendiri dari ISP seperti Dinas Dukcapil dan PTSP.</p> <p>Integrasi Data Integrasi aplikasi baru saja dimulai dan diujicoba untuk aplikasi e-budgeting dan e-planning. Sedangkan untuk integrasi data belum terlaksana, penyampaian data-data</p>

	dikirimkan secara manual dikarenakan jaringan yang belum menjangkau seluruh OPD dan belum adanya pusat data. Saat ini Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil baru memulai kerjasama untuk penggunaan data kependudukan dalam proses di Dinas Kesehatan.
SDM	Ketersediaan SDM pengelola TIK Ada 4 orang PNS dibantu tenaga Non-PNS 3 orang untuk mengelola TIK di Diskominfo. Sedangkan di OPD lain, pekerjaan terkait TIK hanya merupakan pekerjaan tambahan. Peningkatan Kompetensi SDM Tidak ada penganggaran khusus untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi SDM dilakukan dengan mengirim pegawai untuk bimtek atau pelatihan ketika ada undangan dari instansi eksternal seperti Dinas Kominfo Provinsi.
Tata Kelola	Dukungan terhadap Pengembangan TIK Pimpinan daerah sangat mendukung pengembangan TIK terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dukungan pengembangan TIK di Pemda diwujudkan dengan upaya mengintegrasikan data kependudukan sehingga dapat digunakan pada aplikasi di OPD lain. Disamping itu Ketersediaan Aturan Pelaksanaan Pemda Prabumulih memiliki Perbup No. 64/2017 tentang pelaksanaan SPBE. Sedangkan untuk masterplan TIK direncanakan akan selesai tahun ini.

3.2 Pelaksanaan dan Konsep Sumsel *Smart Province*

Program *Smart Province* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan konsep *Smart City* yang diterapkan pada tingkat Pemerintahan Provinsi. Program ini dilatarbelakangi karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan perubahan lingkungan strategis yang diakibatkan perkembangan teknologi dan meningkatnya populasi penduduk. Sebagai contoh pada sektor pendidikan, dimana saat ini Pemerintah Daerah Sumatera Selatan telah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) secara elektronik melalui perangkat komputer dan jaringan internet, dimana metode ini telah menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ujian serta mencegah kecurangan. Untuk memperkuat pelaksanaan program *Smart Province*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumsel *Smart Province*. Peraturan tersebut menyatakan bahwa program Sumsel *Smart Province* bertujuan untuk meningkatkan akses layanan publik melalui integrasi data dan sistem informasi se-Kabupaten/Kota dengan sistem informasi pusat. Adapun pelaksanaannya dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Program-program yang ingin dicapai dalam Sumsel *Smart Province* adalah membangun layanan:

- Pusat data (data center)
- Pusat kendali (command center)
- Contact Center
- Website Pemerintah Provinsi dan website OPD
- Aplikasi dan basis data OPD
- *Email* resmi OPD, pegawai ASN, dan/atau pejabat Pemerintah Provinsi
- Program Sumsel Smart and Care (S2C)
- Fasilitas pendukung lainnya



Gambar 3. Konsep Sumsel *Smart Province*.

Pelaksanaan Sumsel *Smart Province* diwujudkan dengan membangun dan menggunakan berbagai aplikasi elektronik yang dapat diakses secara online untuk mempermudah akses pelayanan publik, diantaranya adalah aplikasi layanan pengadaan, sistem e-planning, e-budgeting, e-monev, dan laporan pertanggung jawaban keuangan dimana kayanan ini terintegrasi dalam aplikasi e-sumsel. Salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah SIGERTAK (Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak) Plus, yaitu aplikasi berbasis data terpadu berdasarkan nama dan alamat (*by-name-by-address*) untuk mendata seluruh penduduk miskin di Sumatera Selatan. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin dengan tepat sasaran dan tanpa penyimpangan. Disamping itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah memiliki Command Center yang berfungsi sebagai pusat informasi dan kendali untuk pengambilan keputusan oleh Gubernur. Fasilitas saat difungsikan sebagai *integrated media management* (IMM) yang bertujuan untuk monitoring seluruh media-media massa terkait pemberitaan seputar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3.3 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dimensi kesiapan teknologi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki infrastruktur TIK dan berbagai aplikasi untuk menunjang pelaksanaan *e-government* bahkan sebelum meluncurkan program *Smart Province*. Saat ini telah ada beberapa aplikasi berbasis elektronik yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung operasional dan administrasi pemerintahan, seperti aplikasi e-budgeting, e-planning, e-monev, dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Pada lingkup pelayanan publik, Pemerintah Provinsi telah lama menggunakan aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Disamping itu juga terdapat beberapa inovasi aplikasi, sebagai contoh aplikasi SIGERTAK (Sistem Informasi Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) yang berfungsi sebagai alat untuk memonitor tingkat kemiskinan penduduk se-Sumatera Selatan, dan SIIKON (Sistem Informasi Infrastruktur Konektivitas) dimana keduanya merupakan inovasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk proses integrasi data dalam lingkup Provinsi masih dalam tahap awal. Dimulai dengan melakukan melakukan perjanjian kerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Program Sumsel Satu Data. Pada program ini, setiap OPD akan menunjuk beberapa staf yang berperan sebagai wali data dan bertugas mengirimkan data-data sektoral yang nantinya

tersimpan di pusat data BPS. Kerja sama juga sedang dijajaki dengan Dinas Dukcapil untuk penggunaan data kependudukan.

Pada aspek SDM, Pemprov Sumatera Selatan sudah memiliki SDM pengelola TIK namun dengan jumlah yang terbatas, dan belum memiliki sertifikat kompetensi. Pada sisi tata kelola, Pemprov memiliki landasan hukum pelaksanaan Sumsel *Smart Province* yaitu Pergub No. 47 Tahun 2017. Peraturan ini menjelaskan organisasi pelaksana Sumsel *Smart Province* serta program-program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan besarnya dukungan Kepala Daerah akan Sumsel *Smart Province*. Hal ini tergambar dari alokasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan sektor TIK.

a. Rekomendasi Pembangunan Sumsel *Smart Province*

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi berperan sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah. Wewenang ini diberikan mengingat luasnya wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Agar pengelolaan daerah lebih efektif, maka Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/kota agar melaksanakan dapat otonominya dalam koridor yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis. Adapun yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi juga memiliki wewenang mengevaluasi kinerja dan pelayanan publik, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ruang lingkup peran Pemerintahan Provinsi, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi dan pendekatan dalam pengembangan Sumsel *Smart Province*, yaitu:

1. Berperan sebagai integrator dan koordinator pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten/Kota. Melalui peran ini, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat mendorong terwujudnya Smart City, Smart Kabupaten, dan *Smart Village* di wilayah Sumatera Selatan, serta mengkoordinasikan proses integrasi data dan aplikasi pada jajaran pemerintah daerah se-Sumatera Selatan.
2. Memperkuat dukungan dan partisipasi semua stakeholder dalam pelaksanaan *Smart Province*, antara lain Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan perusahaan rintisan (*start-up*), akademisi, komunitas, dan publik.
3. Mendesain pola pengembangan SDM aparatur bidang TIK mulai dari rekrutmen hingga pengembangan kompetensi. Sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan SDM, Pemerintah Daerah dapat membuka program magang bagi siswa dan mahasiswa bidang TIK atau memanfaatkan lulusan program pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti program sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau *Digital Talent Scholarship* (DTS).
4. Mensinergikan program-program di Dinas Kominfo se-Sumatera Selatan.
5. Mendorong penggunaan infrastruktur bersama dan aplikasi berbagi pakai.

4. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kesiapan dalam penerapan Smart Province pada dimensi teknologi dan tata kelola. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya infrastruktur dan aplikasi yang telah dimanfaatkan untuk operasional berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk operasional dan administrasi. Kendala pada dimensi teknologi terlihat pada belum terlaksananya integrasi data dan aplikasi secara optimal yang disebabkan karena masing-masing OPD mengelola sumber daya TIK. Meskipun begitu, inisiatif pelaksanaan integrasi data sudah dimulai dengan dimulainya kerjasama dengan beberapa instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan. Demikian pula dukungan pimpinan daerah telah terlihat dengan diterbitkannya landasan hukum pemanfaatan TIK dalam organisasi dalam bentuk peraturan kepala daerah. Hal ini menjadi langkah awal yang baik untuk mengembangkan dan memajukan TIK di Sumatera Selatan

Adapun kelemahan yang tampak adalah pada dimensi sumber daya manusia, dimana sebagian besar OPD masih kekurangan SDM bidang TIK sebagai penggerak pengembangan TIK di organisasi maupun dalam program Smart Province secara keseluruhan. Oleh karena itu penelitian ini juga merumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka peningkatan pengembangan TIK dan Smart Province ke depan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisah. (2017). Usulan Perencanaan Smart City: Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 8(1), 59–80.
- BAPPENAS. (2015). Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia. Retrieved from [ftp://ftp.itb.ac.id/pub/ISO-IMAGES/linux/eii2015itb/151016_Bahan_EII_ITB_Smart_City_v3\[3\].pdf](ftp://ftp.itb.ac.id/pub/ISO-IMAGES/linux/eii2015itb/151016_Bahan_EII_ITB_Smart_City_v3[3].pdf)
- BPS. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Caragliu, A., Bo, C. Del, & Nijkamp, P. (2009). Smart Cities in Europe Smart Cities in Europe. *Proceedings of the 3rd Central European Conference in Regional Science*, 0732(November), 45–59. <https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117>
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Jurnal Society*, 1(1), 35–45.
- Ho, E. (2017). Smart subjects for a Smart Nation? Governing (smart)mentalities in Singapore. *Urban Studies*, 54(13), 3101–3118. <https://doi.org/10.1177/0042098016664305>
- Inayatul Ulya A, Tarigan, A., & Hasnur, P. (2017). Mengukur Kesiapan Kota Dalam Menerapkan Konsep Smart City Inisiatif (Studi Kasus: Kota Banjarmasin). *Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi* –, 9(2), 2088–2162.
- Kemkominfo. (2017). *Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2017: Gerakan Menuju 100 Smart City*. (F. Subkhan, T. Sukardi, F. Lubis, H. Kusdaryanto, F. R. Kautsar, H. S. N. Endah, ... R. Bachtiar, Eds.).
- M. Baeuo, M. O., Ab. Rahim, N. Z. B., & Alaraibi, A. A. M. (2016). Technology Aspects of E-government Readiness in Developing Countries: A Review of the Literature. *Computer and Information Science*, 9(4), 1. <https://doi.org/10.5539/cis.v9n4p1>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ramaprasad, A., Sánchez-Ortiz, A., & Syn, T. (2017). A Unified Definition of a Smart City. In M. Janssen, K. Axelsson, O. Glassey, B. Klievink, R. Krimmer, I. Lindgren, ... D. Trutnev (Eds.) (Vol. 10428, pp. 13–24). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64677-0_2
- Supangkat, S. H. (2018). *Smart Province*. Retrieved July 11, 2018, from <https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/20180208-Smart-Province-4.pdf>

Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. *Populasi*, 10(2).
UN. (2014). *World Urbanization Prospects*.